

# Kalijodo dan Penanganan Berkelanjutan

Oleh Hendra Kurniawan

Eksekusi Kalijodo akhirnya dilakukan juga pada Senin (29/2). Gerak cepat pemerintah dan aparat terkait dalam upaya penertiban Kalijodo perlu diikuti dengan penanganan berkelanjutan. Secara khusus untuk anak-anak perlu mendapatkan suasana lingkungan yang kondusif untuk perkembangan diri dan pendidikan. Bagi para pelaku hiburan malam juga perlu mendapat bimbingan edukatif dan keterampilan untuk kembali pada jalan yang benar. Hal ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat sebagai bentuk kepedulian.

**M**eskipun menuai pro dan kontra, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat terkait bergerak cepat untuk menuntaskan persoalan ini. Upaya penertiban bertujuan untuk mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. Terbatasnya ruang terbuka hijau di Jakarta membuat rencana tersebut patut mendapat dukungan. Yang diharapkan, kelak kawasan Kalijodo akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas daripada sebelumnya yang justru mengundang mudarat.

Memasuki tahun 1970-an,

Kalijodo mulai berubah fungsi. Kafe-kafe bermunculan bahkan rumah-rumah disulap menjadi tempat prostitusi liar. Praktik perjudian ikut marak hingga menghasilkan untung yang luar biasa banyak.

Krishna Murti dalam bukunya, *Geger Kalijodo*, menyebutnya sebagai 'ATM Nasional' karena tingginya perputaran uang di sini. Tempat ini beberapa kali juga menjadi sarang pelaku kriminal. Bahkan, pada September 2001 terungkap praktik perdagangan perempuan oleh Polsek Metro Penjarangan yang bermula dari Kalijodo.

## Sejarah Prostitusi

Maraknya praktik prostitusi di Kalijodo tentu saja tidak lepas dari perkembangan kota. Kalijodo berada di wilayah Kecamatan Penjarangan, Jakarta Utara dan menjadi bagian dari kawasan Kota Tua Jakarta. Letaknya strategis, tak jauh dari pelabuhan lama Sunda Kelapa. Oleh karena itu, kawasan Kalijodo sudah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Para pedagang Tionghoa banyak yang tinggal dan berdagang di sepanjang kawasan tersebut.

Menilik sejarahnya, dalam buku berjudul *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*, Leonard Blusse (2004) menyebut bahwa praktik prostitusi sudah ada di Batavia sejak tahun 1625. Menghadapi maraknya praktik prostitusi di wilayahnya, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen pernah bersikap tegas untuk membe-

rantas tempat-tempat maksiat, namun upayanya kandas.

Tahun 1970-an, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melegalkan atau menyetujui komersialisasi industri seks dengan serangkaian aturan tertentu. Kala itu sasaran-nya yakni kawasan Kramat Tunggak yang ditetapkan sebagai lokalisasi resmi prostitusi melalui SK Gubernur Ali Sadikin. Tercatat sebanyak 300-an pekerja seks komersial dan 76 orang germo. Baru pada tahun 1999, Kramat Tunggak resmi ditutup. Akan tetapi persoalan prostitusi tak berarti selesai, justru kemudian semakin merambah ke tempat-tempat lain.

Jaringan prostitusi kenyataannya memang sulit untuk diberantas habis. Urbanisasi yang tidak terkontrol ke kota-kota besar menambah semakin banyaknya orang yang terlibat dalam praktik-praktik prostitusi. Para pekerja seks komersial juga tidak gampang melepaskan diri dari dunia kelam. Jika sudah tidak bekerja pun mereka akan ganti profesi menjadi germo. Pola seperti ini akan terus berjalan. Oleh karena itu rencana pemerintah menertibkan kawasan prostitusi di Kalijodo tak ayal menimbulkan benturan kepentingan banyak pihak.

## Edukatif

Belum lama ini, Komnas HAM meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan perkembangan anak-anak Kalijodo. Upaya relokasi sebenarnya sudah menjadi langkah awal yang baik

dengan menyiapkan tempat baru yang lebih kondusif bagi pendidikan anak. Situasi Kalijodo yang marak dengan praktik kehidupan malam jelas tidak baik untuk perkembangan anak. Pemerintah juga memberi fasilitas penunjang pendidikan termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak dari Kalijodo.

Selain itu beberapa dinas terkait juga perlu dilibatkan untuk melakukan upaya edukatif yang konstruktif bagi para pelaku hiburan malam di Kalijodo. Tujuannya agar para pekerja seks komersial, germo, maupun muncikari dapat diberi pemahaman yang tepat agar tidak kembali pada pekerjaan lamanya. Mereka perlu dibekali dengan keterampilan agar mampu berwirausaha dengan baik. Pemerintah juga perlu menyediakan lapangan kerja atau membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya.

Penanganan berkelanjutan diperlukan karena tidak ada yang bisa mengawasi jika sewaktu-waktu di antara mereka hendak kembali pada jalan yang sesat. Pendampingan iman, psikologis, maupun bimbingan usaha perlu diintensifkan sampai mereka benar-benar merasa menikmati dan menekuni aktivitasnya yang baru. Ketika sudah yakin benar barulah mereka diberi kepercayaan untuk menjaga diri sendiri. Pascarelokasi warga Kalijodo memerlukan perhatian pemerintah dan dukungan dari masyarakat khususnya para pegiat sosial sebagai wujud kepedulian bersama. \*\*\*

*Penuis adalah dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*